

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
TUNAI PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DI KELURAHAN SEI SIKAMBING B
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

ANNISA YUNDA SYAFIRA

178520012



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
TUNAI PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DI KELURAHAN SEI SIKAMBING B
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

ANNISA YUNDA SYAFIRA

178520012

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

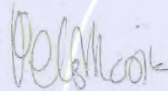
HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa
Pandemi *Covid-19* Di Kelurahan Sei Sikambang B Kota
Medan

Nama : Annisa Yunda Syafira
Npm : 178520012
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh

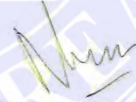
Komisi Pembimbing


(Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP)
Pembimbing I


(Nina Angelia, S.Sos, M.Si)
Pembimbing II

Mengetahui :


Dr. Hen Kusmanto, MA
Dekan


(Nina Angelia, S.Sos, M.Si)
Ka.Prodi

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan” yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukannya adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, 18 Juni 2021



Annisa Yunda Syafira
178520012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Yunda Syafira
NPM : 178520012
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

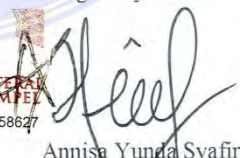
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 18 Juni 2021

Yang menyatakan.

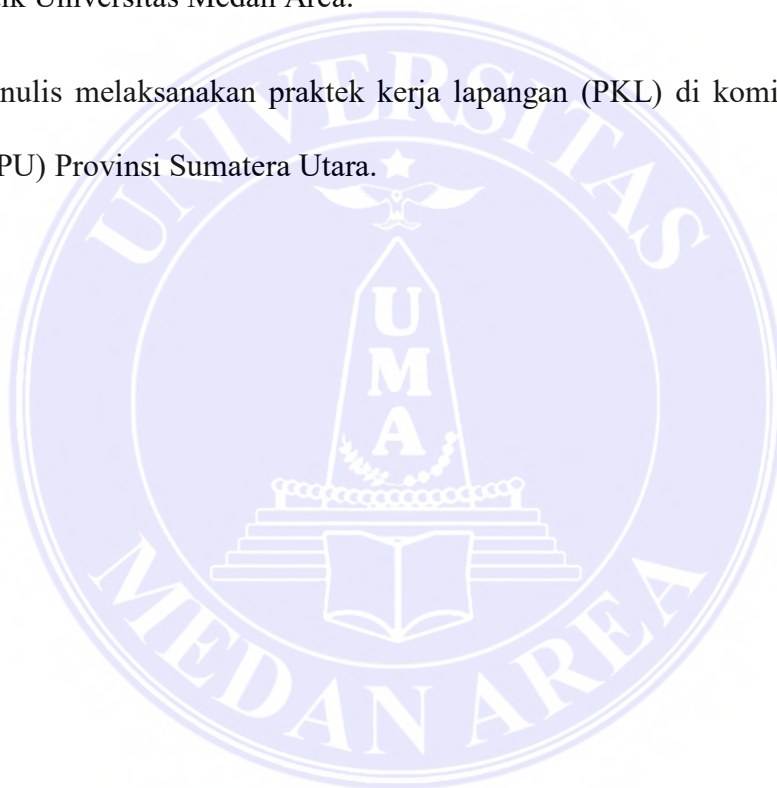



Annisa Yunda Syafira
178520012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Maret 2000 dari ayah Suhartono dan Ibu Sri Kumala Sari. Peneliti merupakan Putri pertama dari tiga bersaudara. Tahun 2017 peneliti lulus dari SMA Sultan Iskandar Muda, dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKELURAHAN SEI SIKAMBIING B KOTA MEDAN

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan terkena dampak wabah *corona virus disease* 2019 (COVID 19). Bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial tunai. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih ada sebagian masyarakat yang tergolong miskin belum mendapatkan bantuan dikarenakan kurangnya ketelitian dalam pendataan, kurangnya pendataan dikarenakan data yang digunakan merupakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2015. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan data yang didapat dari lapangan yang menjelaskan dengan kata-kata. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III dengan melihat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya SDM dan Anggaran, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan dimana bantuan sosial tunai harus dimanfaatkan oleh KPM Bantuan sosial tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak *corona virus disease* 2019 (COVID 19 Berdasarkan data-data yang telah di kumpulkan dapat di tarik kesimpulan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak berjalan dengan optimal dan tidak tepat sasaran sehingga program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan. belum berjalan dengan efektif dan belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Sosial Tunai.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE SEI SIKAMBIING B VILLAGE MEDAN CITY

Cash Social Assistance (BST) is a government assistance program in the form of cash grants given to poor, underprivileged families who are affected by the corona virus disease 2019 (COVID 19) outbreak. Cash social assistance is given to beneficiary families (KPM), namely families who are designated as recipients of cash social assistance. The problem in this study is that there are still some people who are classified as poor who have not received assistance due to lack of accuracy in data collection, lack of data collection because the data used is data from the 2015 Social Welfare Integrated Data (DTKS) 2015. This type of research uses a qualitative method with a descriptive approach, namely describe the data obtained from the field that explains in words. This study uses the theory of George C. Edwards III by looking at four variables, namely communication, HR and budget resources, disposition, and bureaucratic structure. This study aims to determine the implementation of the Cash Social Assistance (BST) program in Sei Sikambing B Village, Medan City where cash social assistance must be utilized by KPM Cash social assistance to reduce the burden of living due to the impact of corona virus disease 2019 (COVID 19). collected, it can be concluded that the Cash Social Assistance (BST) is not running optimally and is not on target so that the Cash Social Assistance (BST) program in Sei Sikambing B Village, Medan City, has not run effectively and has not been maximized.

Keywords: Implementation, Cash Social Assistance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Progam Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan)”**. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Peyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu Beby Masitho Batubara,S.Sos, MAP Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Ibu Nina Angelia,S.Sos, M.Si Selaku ketua prodi administrasi publik sekaligus Dosen Pembimbing II penulis
5. Ibu Chairika Nasution,SAP, MAP selaku sekretaris pembimbing penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, terkhusus dosen program studi administrasi publik Universitas Medan Area.
7. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik saat peminjaman buku
8. Seluruh staff dan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Pihak dari pemerintahan Kelurahan Sei sikambang B yang sudah memberikan kesempatan, waktu dan tempat dan pelayanan yang baik bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai
10. Seluruh keluarga, terkhusus kepada ayah dan ibu atas segala doa, dukungan dan perhatiannya sehingga penulis dapat sampai pada titik ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Kesehatan kepada orang tua penulis.
11. Teman-teman sealmamater Administrasi Publik angkatan tahun 2017 universitas medan area
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan, untuk itu penulis dengan senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa Universitas Medan Area. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, 18 Juni 2021

Penulis



Annisa Yunda Syafira
178520012

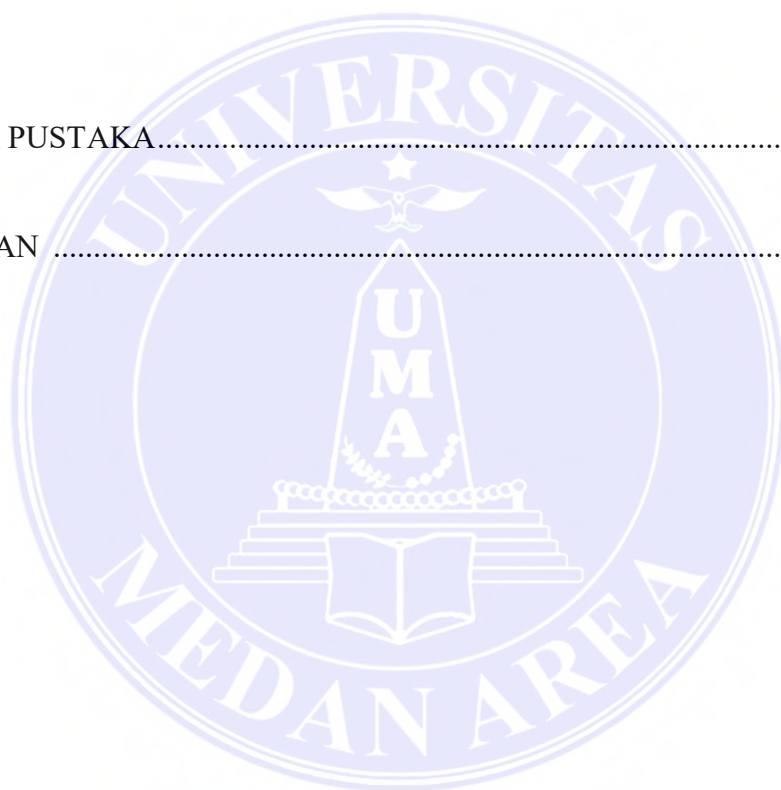


DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi	5
2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	6
2.3 Tingkatan Dalam Kebijakan Publik	7
2.4 Model Implementasi George C. Edwards III	9
2.5 Program Bantuan Sosial Tunai	13
2.5.1 Penerimaan Bantuan Sosial Tunai	14
2.5.2 Kriteria Calon Penerima.....	14
2.5.3 Manfaat Program Bantuan Sosial Tunai	15
2.6 Peraturan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai	15

2.7 Penelitian Terdahulu	16
2.8 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	22
3.3 Sumber Data	22
3.4 Informan Penelitian	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kelurahan	31
4.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Sei Sikambang B	32
4.1.2 Kondisi Demografis Kelurahan C	33
4.1.3 Visi Dan Misi Kelurahan Sei Sikambang B	36
4.1.4 Struktur Organisasi Kelurahan Sei Sikambang B	37
4.1.5 Tugas Dan Fungsi Di Kelurahan Sei Sikambang B	37
4.2 Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai	42
4.2.1 Sumber Data Dan Persyaratan Keluarga Penerima Manfaat	42
4.2.2 Jangka Waktu Pencairan Bantuan Sosial Tunai	44
4.2.3 Pelaksana Bantuan Sosial Tunai	45
4.2.4 Penyaluran Bantuan Sosial Tunai	58

4.2.5 Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai	51
4.3 Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai	51
4.4 Hambatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai.....	62
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	64
Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	70

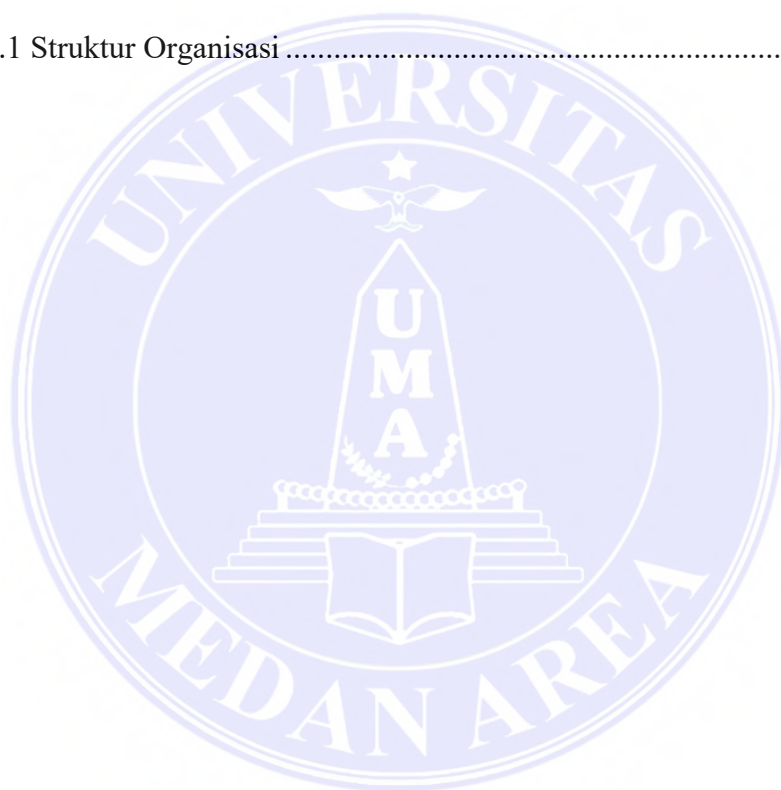


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aplikasi Konseptual Model Edward III	12
Tabel 2.2 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang	19
Tabel 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	23
Tabel 4.1 Data Perangkat Kelurahan Sei Sikambing B	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.3 Jumlah Mutasi Penduduk	34
Tabel 4.4 Jumlah Kepala Keluarga	34
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Miskin	35
Tabel 4.6 Penerima Bantuan Sosial Tunai	52
Tabel 4.7 Data Masyarakat Penerima Tidak Valid	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III.....	12
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data Triangulasi	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami pandemic *corona virus disease* (Covid-19), penyebaran corona virus disease (covid-19) pada tahun 2019 telah sangat mengganggu aktivitas perekonomian dan berdampak signifikan terhadap perekonomian sebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia.

Perkembangan pandemic corona virus disease (Covid-19). hal ini juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi di Indonesia. salah satu dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, bahkan melemahkan aktivitas ekonomi.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari pertumbuhan ekonomi yang menurun presiden republik Indonesia telah mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan corona virus disease 2019(Covid-19).

Salah satu program dalam jaring pengaman sosial adalah Bantuan Sosial tunai yang pada awal dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), yang dalam perkembangannya telah diubah dengan keputusan menteri sosial nomor 86/HUK/2020 tentang perubahan atas keputusan menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020. Dalam keputusan menteri sosial tersebut mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai

Menghadapi permasalahan covid 19, maka jelaslah sehebat apapun sebuah implementasi kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, termasuk kebijakan membuat program untuk memberikan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*. Salah satu programnya yakni Bantuan Sosial Tunai (BST)

Kelurahan Sei Sikambang B sebagai salah satu Instansi Pemerintahan yang berhubungan dekat dengan masyarakat, di Kelurahan Sei Sikambang B keberadaan bantuan sosial tunai (BST) belum begitu dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masih terdapatnya masyarakat yang tergolong miskin dan masyarakat yang terdampak covid 19 tidak memperoleh bantuan sosial tunai (BST) dan Kurang akuratnya pendataan akan menentukan pemberian bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat, dikarenakan data yang digunakannya adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2015. Berdasarkan data yang tercatat di kelurahan sei sikambang B jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 24.774 jiwa, yang terdiri dari 22 lingkungan, 12.225 jiwa penduduk laki-laki jiwa, 12.549 jiwa penduduk perempuan, 5.381 jumlah kepala keluarga laki laki dan 703 jiwa jumlah kepala keluarga perempuan, 1295 jiwa yang mengajukan bantuan sosial tunai dan 568 jiwa yang menerima bantuan sosial tunai (BST).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan Judul **“Implementasi Progam Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemic *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan dan Apa yang menjadi hambatan pada Program Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Program Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik serta memperkaya khasanah kepustakaan dalam implementasi program

Bantuan Sosial Tunai (BST) serta dapat mendukung sebagai bahan masukan bagi yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pemerintah Kota Medan. Dalam hal ini Kelurahan Sei Sikambang B untuk menyempurnakan pelayanan terhadap implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) serta sebagai bahan input (masukan) dalam meningkatkan implementasi program bantuan sosial tunai

1.4.3 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan Karya Ilmiah terkait mengenai Impelementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam upaya memberikan bantuan bagi masyarakat di Kelurahan Sei Sikambang B.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Menurut Zainal Abidin dalam buku Deddy Mulyadi (2018 : 26) Adapun proses pendekatan implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan 2 faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan di implementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam impementasi kebijakan tersebut.

Menurut Indra Muda (2019 :76) Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi implementasi juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan publik, oleh karna itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Menurut Gordon dalam buku Deddy Mulyadi (2018 : 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode- metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018 : 25-26) terdapat pendekatan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan sebagai berikut : *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi dan *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar

2. Pendekatan *Prosedural/manajerial*

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

2.3 Tingkatan Dalam Kebijakan Publik

Tingkatan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018 : 36-39) adalah "*Whatever Governments choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau

mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam buku (Deddy Mulyadi, 2018:38-39) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan; Pertama kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kedua kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Ketiga kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Adapun contoh jenis kebijakan dalam tingkatan kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan umum

Kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional, Wewenang; Presiden bersama-sama dengan DPR dan DPD, dan Bentuk: UUD, UU, Perpu

2) Kebijakan Pelaksana

Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan, Wewenang Presiden, dan Bentuk: PP, Kepres, Inpres

3) Kebijakan teknis

Sebagai penjabaran dan kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Wewenang, Mentri, Pejabat

setingkat Menteri/LNPK, dan Bentuk : Keputusan, Peraturan, Instruksi pejabat tertentu .

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

2.4. Model Implementasi George C.Edwards III

Menurut Edward III 1980 dalam Mulyadi (2015:163-165) studi implementasi kebijakan adalah kursorial bagi administrasi publik termasuk didalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhinya. Adapun secara pembentukan kebijakan Edward III dalam Mulyadi (2015:163-165) menjelaskan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. tersebut sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada public, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi

dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Pendanaan digunakan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan mencukupi tentang cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementor tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Sikap dan komitmen pelaksana program (Disposition), sikap dan komitmen ini menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Disposisi berhubungan dengan kesediaan para implementor untuk menyelesaikan suatu kebijakan publik. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan

implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

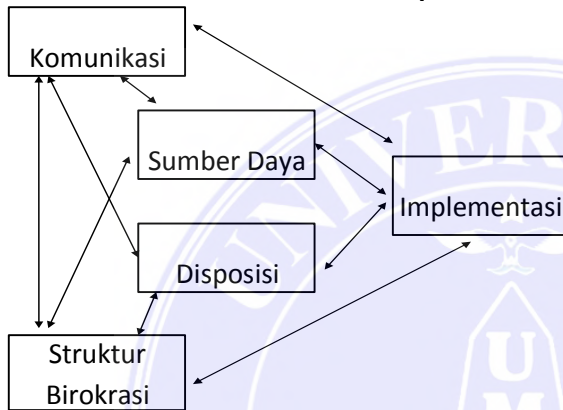
- d. Struktur Birokrasi Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur serta tidak disiplin akan mudah sekali

melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya .Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran karena terjadinya kesenjangan.

Model dari George C Edward III ini dalam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Implementasi



Sumber : Indiahono (2009)

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya ,empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik , Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Aplikasi Konseptual model Edward III

Aspek	Ruang Lingkup
-------	---------------

Komunikasi	<p>a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan ?</p> <p>b. Bagaimana sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> -Metode yang digunakan -Intensitas komunikasi
Sumber daya	<p>a.Kemampuan Implementor</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat pendidikan -Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program -Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan <p>b.Ketersediaan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> -Berapa dana yang dialokasikan -Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan.
Disposisi	<p>Karakter pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat komitmen dan kejujuran:dapat diukur dengan konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya. -Tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran,mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<p>a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami</p> <p>b. Struktur organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana.Semakin jauh berarti semakin rumit,birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program

Sumber : Indiahono (2009)

2.5 Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

2.5.1 Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin,tidak mampu,dan/atau rentan yang terkena dampak wabah covid 19. Bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM)

yaitu keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial tunai. Pelaksanaan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Program Bantuan sosial Tunai telah dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2020 Tujuan dari Program Bantuan sosial Tunai bagi keluarga penerima manfaat dalam rangka untuk mengurangi beban hidup akibat dampak pandemi COVID-19. , Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

2.5.2 Kriteria Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

Keluarga penerima manfaat(KPM) bantuan sosial tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM bantuan sosial tunai melalui system Informasi kesejahteraan sosial *Next Generation* (SIKS-NG) persyaratan bagi KPM baru yang di usulkan dinas sosial daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.5.3 Manfaat Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan terkena dampak wabah *corona virus disease* 2019 (COVID 19). Bantuan sosial tunai harus dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak *corona virus disease* 2019 (COVID 19).

2.6. Peraturan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai yang pada awal dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease* 2019 (COVID19) dengan dana berjumlah Rp.600.000/keluarga per bulan. Kemudian ada perubahan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (COVID19) dengan dana berjumlah Rp.300.000/keluarga per bulan. Dan terjadi lagi perubahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 30/6/SK/HK.02.02/8/2020 tentang petunjuk penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease* 2019 (COVID19) melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai

dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), yang dalam perkembangannya telah diubah dengan keputusan menteri sosial nomor 86/HUK/2020 tentang perubahan atas keputusan menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease 2019* (COVID19). Dalam keputusan menteri sosial tersebut mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Nur Dhillah Haryanti, 2012 dengan Judul Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria

masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Dalam hal pengawasan program ini belum berjalan dengan baik, kemudian belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan. Hal ini membuat program ini berjalan tidak tepat sasaran

Harwidiansyah,2011 dengan judul Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

“Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan mereka. Masalah ini dilihat dengan pendekatan sosiologi dan komunikasi dan dibahas dengan metode kualitatif. Bagi pemerintah program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial yang berupa tunjangan uang yang umumnya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga berdasarkan kondisi kemiskinan, tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi. Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, karena

beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin dengan adanya inflasi akibat kenaikan harga minyak masih lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program Bantuan Langsung Tunai.

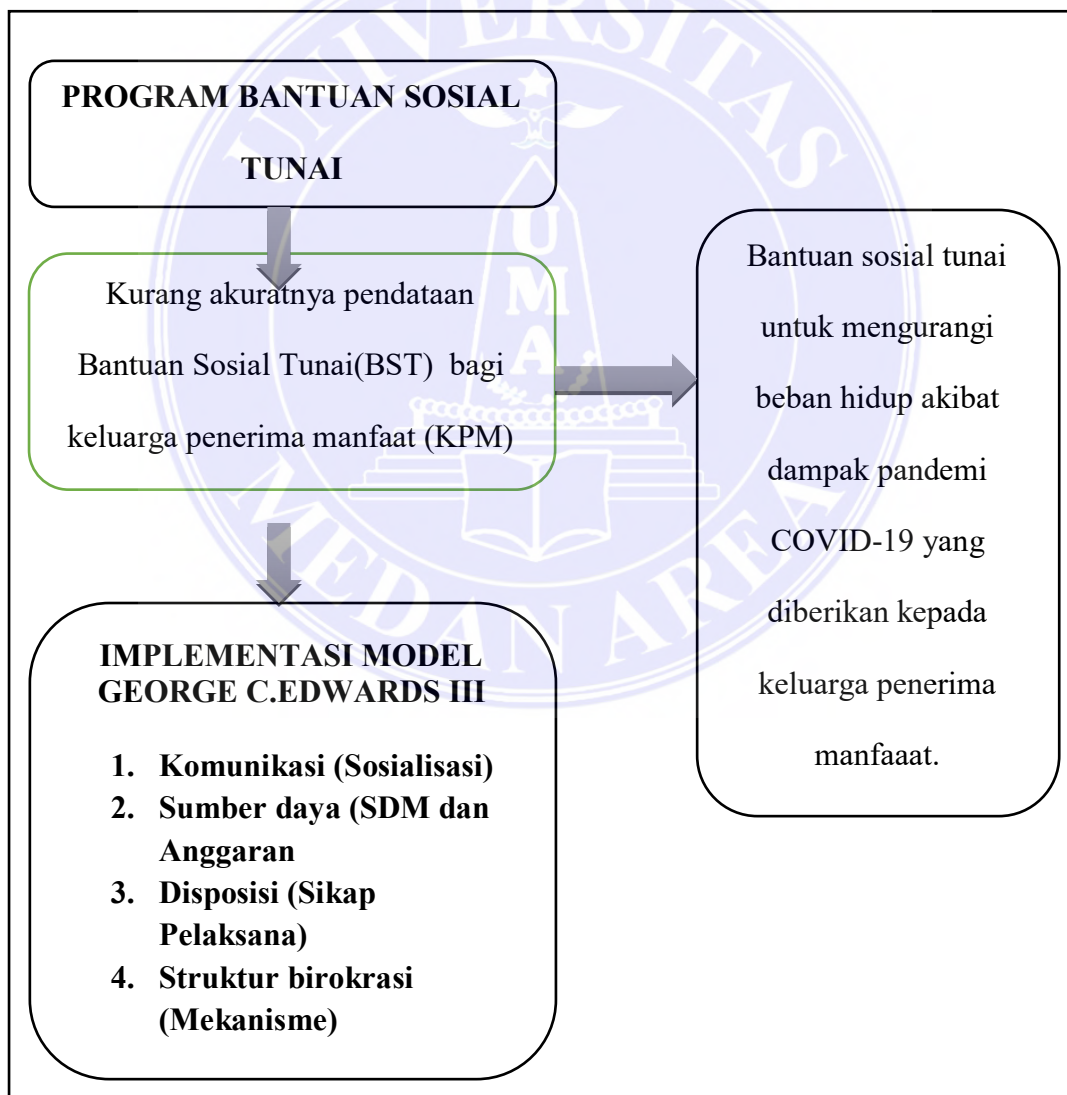
Junaidi Kariono 2008, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur” Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No.	Nama	Skripsi/Tesis	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Dhillah Haryanti	Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan teori Edward III - Lokasi penelitian. - Menggunakan metode kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu membahas bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Sedangkan penelitian sekarang membahas bantuan sosial tunai yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang terdampak wabah virus corona deasease (COVID19)
2.	Harwidiansyah	Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas bantuan langsung tunai yang sekarang sudah berubah menjadi bantuan sosial tunai 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa sedangkan penelitian saya menjelaskan implementasi bantuan sosial di masa pandemic <i>corona virus disease</i> (covid 19) dan hambatan yang terjadi
3.	Junaidi Kariono	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan teori kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan 5 Model implementasi kebijakan publik Sedangkan penelitian saya focus di teori Edward III.

2. 8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset Prastowo,(2016:170) Pada penyusunan penelitian harus berdasarkan pada kerangka pemikiran. Secara garis besar kerangka pemikiran penulisan ini adalah Penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sei Sikambang B , diharapkan Program BLT ini mampu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak covid 19.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yang artinya data diambil bukan dari angka-angka, melainkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi

Menurut Meleong dalam sugiyono (2015 : 15), metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Haris Herdiansyah,(2014:116) Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 pada kelurahan Sei Sikambing B.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor kelurahan Sei Sikambang B, yang beralamat di jalan Merak NO.17 Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Nov 2020	Des 2020	Jan-Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021
1.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Pengambilan Data Survei							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Seminar Hasil							
6.	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi							
7.	Pengajuan Sidang Meja Hijau							
8.	Sidang Meja Hijau							

3.3 Sumber Data

Data Kualitatif bersifat naratif dan deskriptif. Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian kualitatif terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan dengan sumber informasi yang menjadi fokus penelitian.

Sumber data tersebut terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer data adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti (Responden). Nasution, (2016:143).

Sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer yang diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Joko Subagyo, (2015:87)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah, dan perpustakaan. Sumber data sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya. Untuk itu peneliti harus mengetahui dimana bahan dapat diperoleh yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya. Nasution, (2016:143)

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapya dan relevan dengan tujuan penelitian. Afrizal, (2014:139)

Dalam penelitian Kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informasi Kunci,.

Informan kunci yaitu informan yang memberikan informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti atau suatu hal kepada peneliti dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara . Pada penelitian ini informan kuncinya adalah Lurah Sei Sikambang B.

2. Informan Utama , yaitu mereka yang mengetahui tentang program bantuan sosial tunai (BST. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kordinator kecamatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

3. Informan Tambahan / Responden, yaitu mereka yang memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST) yang ada di kelurahan Sei Sikambang B.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, (2018 : 224) Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif ada 3 macam, yakni observasi,wawancara,dan dokumentasi. Sedangkan, untuk mempertinggi derajat kepercayaan atas hasil penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data dapat ditambah dengan menggunakan teknik triangulasi.

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi yang digunakan dengan menggunakan metode observasi Partisipatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung proses implementasi progam bantuan sosial tunai pada masa pandemi Covid-19 pada kelurahan Sei Sikambang B Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

Dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, dan tepat.

2. Wawancara

Menurut Agustinus Bandur,(2014:94) Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan

mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi dan untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial tunai di kelurahan Sei Sikambing B.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2007, 82). Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Secara khusus, untuk penelitian kualitatif dan sejarah, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.

Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program bantuan sosial tunai pada masa pandemi Covid-19 pada kelurahan Sei Sikambing B.

Dokumen pada dasarnya : pertama, rekaman yang bersifat tertulis dan kedua isinya adalah peristiwa yang telah berlalu jadi dokumen bukanlah catatan

peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang namun catatan masa lalu. (prastowo,2016:192).

4. Triangulasi

Menurut Mantja, dalam buku imam gunawan (2016:219) triangulasi digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang seperti pengamatan,dan wawancara atau penggunaan metode yang sama seperti wawancara dengan berbagai informan. Kredibilitas (Validitas) analisis lapangan dapat juga diperbaiki melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.

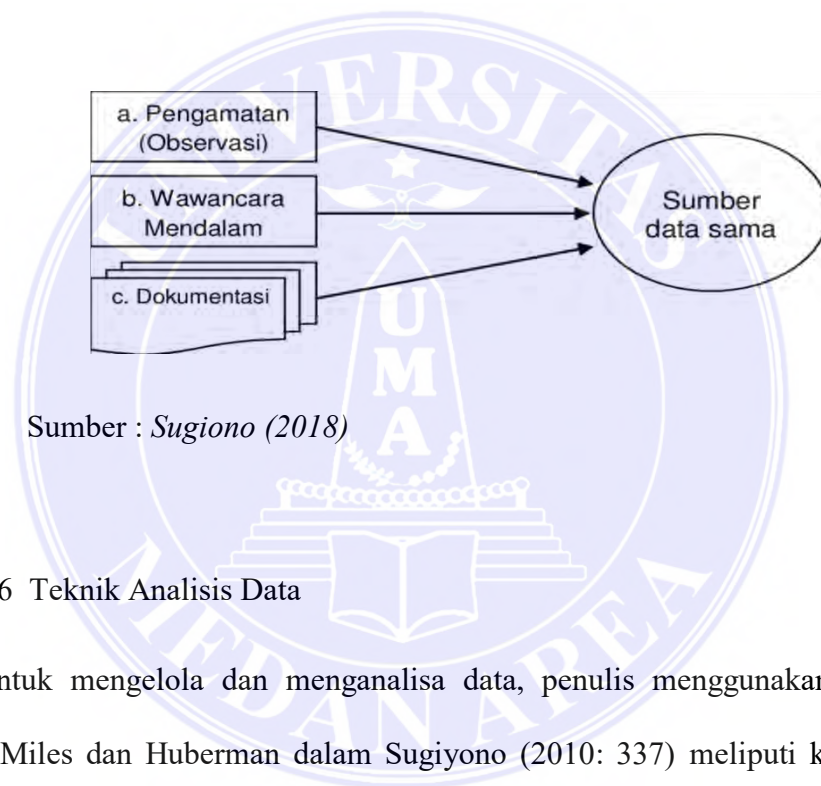
Menurut imam gunawan (2016:219), triangulasi data digunakan sebagai proses memntapkan derajat kepercayaan(kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas)data,serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

Menurut Danu Eko Agustinova, (2015:45) dalam riset kualitatif demi terjaminnya keakuratan data,maka peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah,demikian pula sebaliknya. Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya,dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

Menurut Sugiono dalam buku imam gunawan, (2016:219) triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran,tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Gambar 3.1 Triangulasi



3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengelola dan menganalisa data, penulis menggunakan metode Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 337) meliputi komponen diantaranya Model Analisis Interaksi (*interactive analysis models*).

Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat dilihat pada gambar berikut :

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yang kedua yaitu model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

b. Reduksi data (*Data reduction*)

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Sugiyono (2007: 338) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Menurut Hamid Patilima (2013:101) reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas.

c. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut..

Menurut Matthew dan Michael dalam buku Hamid Patilima (2013:101) penyajian data yaitu yang paling sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif.

d. Penarikan kesimpulan atau *Verification*

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Verification* ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Menurut Hamid Patilima (2013:101) menarik kesimpulan dilakukan dari permulaan pengumpulan data,peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola dan alur sebab-akibat. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan dan pembuktian atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Implementasi program bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *corona viris disease* 2019 (COVID 19) di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari sosialisasi yang hanya dilakukan sekali saja dan tidak tepat sasaran dikarenakan masih menggunakan data lama, dan anggaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial tunai (BST) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2020 sehingga sering terjadi penurunan keluarga penerima manfaat karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.
- b. Hambatan dalam pengimplementasi program bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *corona viris disease* 2019 (COVID 19) di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan terkait tidak tepatnya sasaran dalam memberikan bantuan sosial tunai masih banyak permasalahan yang terjadi dilapangan terkait adanya penerima bantuan sosial tunai yang sudah meninggal, Adanya penerima bantuan sosial tunai yang pindah alamat, Adanya penerima bantuan sosial tunai yang sudah tidak layak, misal sekarang sudah mampu secara ekonomi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi (COVID 19) di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

- a. Dilakukan pendataan baru secara objektif sehingga semua masyarakat miskin/kurang mampu terdaftar di data terpadu dan kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga apabila terdapat program bantuan baru sudah terdada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan kemudian adanya musyawarah kelurahan (MUSKEL) dari dinas sosial ke kelurahan yang bertujuan untuk Verifikasi data / perbaikan data penerima bantuan sosial jadi untuk bantuan selanjutnya sudah tidak menggunakan data lama. Kepada aparat pelaksana tetap memiliki komitmen yang jelas dan bertanggungjawab saat menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan SOP yang berlaku agar pelaksanaan program program bantuan sosial tunai (BST) berjalan secara maksimal.
- b. Tim pelaksana yaitu Petugas penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) dari PT.Pos Indonesia agar menambah sumber daya manusia ataupun petugasnya agar tidka terjadinya kerumunan dimasa pandemi *corona viris disease* 2019(COVID 19 sehingga pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial tunai dapat berjalan dengan baik dan tidak membutuhkan waktu lama. Keberlanjutan program dalam rangka mensejahterakan masyarakat ini perlu dilakukan dan dievaluasi secara terus-menerus agar tujuan dari program dapat berjalan secara masimal dan sesuai dengan SOP yang sudah di tentukan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, W. (2018). *Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustinova, D. E. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Bandur, A. (2014). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, & Teknik Analisis Data*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muda, I. (2019). *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2016). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, J. (2015). *Metode Penelitian Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal :

Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan . *Jurnal Politico*, Vol 9, No 2.

Haryanti,N.D.(2015).”*Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) diKecamatan Tanjung Pinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjung Pinang*”.Skripsi FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Haji, Kota Pinang.

Finahari. (2018). Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Sebagai Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017. *Naskah Publikasi*.

Internet:

[https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku Saku Pendataan BLT-Dana Desa FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desha_FINAL.pdf)(diakses pada tanggal 10 Okt 2020)

<https://www.oborkeadilan.com/2020/08/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt.html> (diakses pada tanggal 15 Okt 2020)

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Bahan-Sosialisasi-PMK-40-Tahun-2020_23-April-2020.pdf (diakses pada tanggal 18 Okt 2020)

PEDOMAN WAWANCARA

a. Pedoman wawancara untuk lurah

1. Kapanakah program bst dimulai di Kelurahan Sei Sikaming B
2. Bagaimana sosialisasi Program BST dilakukan kepada masyarakat
3. Apa saja syarat yang termasuk dalam kriteria masyarakat penerima manfaat
4. Bagaimana alur pendistribusian Program BST
5. Apakah ada petugas dari kelurahan dalam pembagian dana BST dan siapakah yang bertanggung jawab dalam pencairan dana bantuan bst
6. Bagaimana syarat pencairan dana BST
7. Berapa jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah
8. Bagaimana penyaluran dana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat
9. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai adanya Program BST
10. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyaluran Program BST

b. Pedoman wawancara untuk masyarakat

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang program Bantuan sosial tunai ?
2. Selama berjalannya program bantuan sosial tunai apakah ada dilakukan sosialisasi oleh pihak pelaksana pembagian bantuan sosial tunai ?
3. Apakah sumber daya manusia dalam penyaluran bantuan sosial tunai sudah cukup ?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap dari penyalur?

5. Menurut ibu apa yang menjadi kelemahan program ini atau adakah kendala lain dalam penyaluran bantuan sosial tunai ?
6. Apa saran yang ibu berikan untuk kedepannya agar program pemerintah nantinya berjalan lebih baik lagi

c. Pedoman wawancara untuk pelaksana pembagian bantuan sosial tunai

1. Kapankah program bst dimulai di Kelurahan Sei Sikambang B
2. Bagaimana sosialisasi Program BST dilakukan kepada masyarakat
3. Apakah ada kendala dalam penyaluran bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat
4. Dimanakah pelaksanaan pembagian bantuan sosial tunai
5. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial tunai ?
6. Bagaimana solusi dalam menangani permasalahan yang terjadi

LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak R.M HUSNI IQBAL, SST sebagai Sekretaris Lurah di Kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan (18 Januari 2021)



Gambar 2 : Wawancara dengan bapak Sahlan Ramadhan Nst.SSTP SST sebagai Lurah di Kelurahan Sei Sikambang B Kota Medan (01 Febuari 2021)



Gambar 3 : Wawancara dengan kordinator kecamatan ibu Helena pada saat penyaluran bantuan sosial tunai (15 Febuari 2021)



Gambar 4 : pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial tunai yang dilakukan PT.Pos Indonesia (15 Febuari 2021)



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Irma inka pratiwi sebagai masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST) (14 Januari 2020)



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu syamsidar sebagai masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST) (14 Januari 2020)



Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Ramlan Nasution sebagai masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST) (14 Januari 2020)



Gambar 8: pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial tunai yang dilakukan PT. Pos Indonesia (15 Febuari 2021)



Gambar 9: pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial tunai yang dilakukan PT. Pos Indonesia (15 Febuari 2021)



Gambar 10:

Wawancara dengan Ibu Arfah sebagai masyarakat penerima bantuan sosial tunai (14 Januari 2021)

